



Perbandingan Pemerintahan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Upaya Meningkatkan Literasi (Studi Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Indonesia Dengan Kementerian Pendidikan Malaysia)

Salsabilla Putri Nurimani¹⁾, Neneng Yani Yuningsih²⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran

salsabilla20003@mail.unpad.ac.id¹⁾

neneng.yani@unpad.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas pentingnya literasi dalam aktivitas pendidikan dan membandingkan upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan literasi. Berdasarkan survei PISA 2022, Indonesia memiliki skor literasi 359 poin, sementara Malaysia 388 poin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan, persamaan, kelebihan, dan kekurangan dari Kementerian Pendidikan kedua negara dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dan kebijakan literasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi, dengan teknik purposive dan snowball dalam penentuan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki regulasi terkait sistem pendidikan, perpustakaan, perbukuan, dan bahasa, serta program literasi di tingkat sekolah, masyarakat, dan keluarga. Kedua negara juga menyediakan buku dalam bentuk luring dan daring. Perbedaan utama terletak pada jumlah regulasi dan jenis program literasi. Kebijakan literasi di Indonesia sudah mencakup semua tingkat literasi, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat epistemik. Sementara itu, Malaysia telah mencapai tingkat tersebut. Penelitian ini juga menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing negara dalam mengembangkan literasi.

Kata kunci: Perbandingan Literasi, Kebijakan Pendidikan, Pendekatan Kelembagaan, Program Literasi dan Literasi Epistemik

Abstract

This research discusses the importance of literacy in educational activities and compares the Indonesian and Malaysian governments' efforts to improve literacy. Based on the PISA 2022 survey, Indonesia has a literacy score of 359 points, while Malaysia has 388 points. This study aims to explain the differences, similarities, advantages and disadvantages of the two countries' Ministries of Education using an institutional and policy approach to literacy. The research method used is qualitative with a comparative method. Data were collected through literature study, interviews and observations, with purposive and snowball techniques in determining informants. The results show that both countries have regulations related to the education system, libraries, books and languages, as well as literacy programs at the school, community and family levels. Both countries also provide books in offline and online forms. The main difference lies in the number of regulations and types of literacy programs. Indonesia's literacy policy covers all levels of literacy but has not yet reached the epistemic level. Meanwhile, Malaysia has reached this level. The study also highlights the strengths and weaknesses of each country in developing literacy.

Key words: Comparative Literacy, Education Policy, Institutional Approach, Literacy Program and Epistemic Literacy



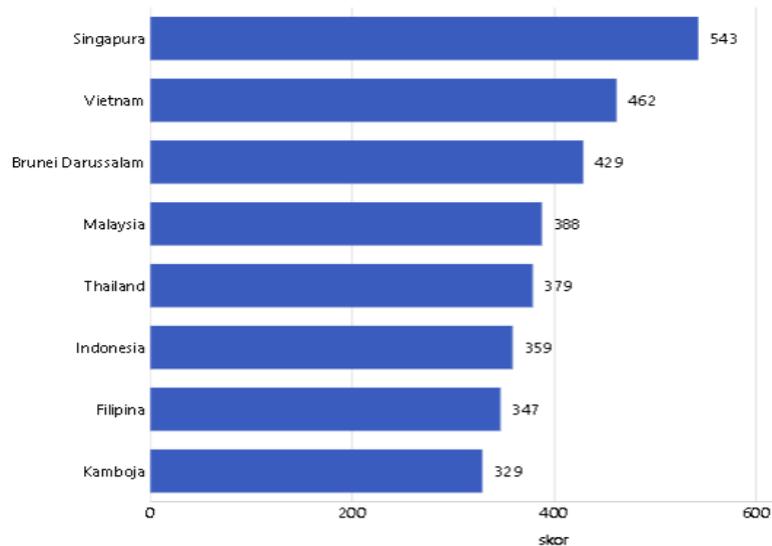
PENDAHULUAN

Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan, berikut dengan hubungan yang sudah terjalin sangat erat satu sama lain. Namun, kedua negara tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Malaysia dengan sistem pemerintahan parlementernya. Hal ini menjadi menarik untuk dapat mengulik salah satu aspek penting dalam kedua negara, yakni pendidikan, dari kedua negara yang memiliki banyak kesamaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya—kendatipun dari konteks sudut pandang sistem pemerintahan yang berbeda satu sama lain. Pendidikan adalah proses mempengaruhi individu untuk memperbaiki lingkungan mereka dan mengubah diri mereka sendiri. Pada hakikatnya, semua orang menginginkan pendidikan. Pendidikan harus dibangun dan ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di masa depan karena pendidikan adalah kunci.

Departemen Victoria School Education dengan Catholic Education Office Victoria mengemukakan bahwa literasi sangat sulit untuk didefinisikan karena sesungguhnya literasi merupakan konstruksi sosial dan gagasan kompleks yang bisa saja memiliki definisi berbeda-beda bagi kelompok budaya dan waktu tertentu. Oleh karena itu, literasi relatif dinamis. Walaupun literasi secara umum diartikan sebagai membaca dan menulis, literasi merupakan hal kompleks yang mencakup proses keterampilan berbahasa dan berpikir yang terintegrasi (Bergebál Vázquez et al., 2024).

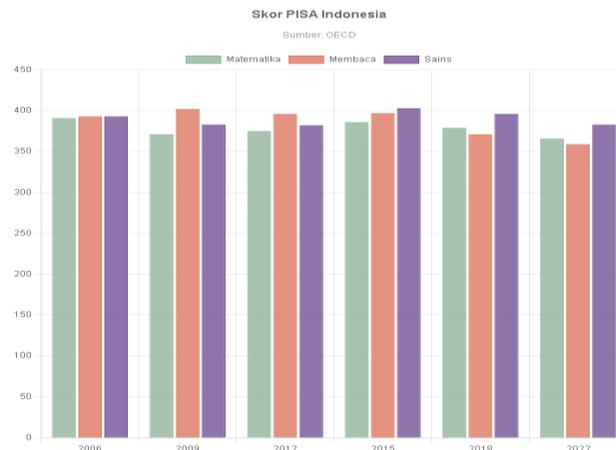
Secara global, menurut data yang dilansir dari World Bank, tingkat literasi dunia menempati angka 87 persen. Hingga tahun 2022, angka literasi dunia mengalami peningkatan. Seperti yang dapat ditinjau dari tabel 1.1 di atas, pemerintah di Negara-Negara Eropa memang memberikan penekanan terhadap pendidikan anak usia dini. Dengan kata lain, pemerintah di negara-negara tersebut memastikan anak-anak menerima akses sejak awal perjalanan pendidikan mereka. Sebagai contoh di Finlandia, pemerintah menyediakan pendidikan gratis untuk seluruh siswa, termasuk pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Pendekatan Pemerintah Finlandia ini memastikan bahwa semua orang memiliki hak terhadap akses pendidikan tanpa memandang latar belakang finansial.

Kemudian terdapat skor kemampuan membaca pelajar di ASEAN Menurut PISA 2022. Kemampuan membaca (*reading performance*) pelajar Indonesia tergolong rendah di skala ASEAN. Hal ini terlihat dari laporan penilaian kemampuan pelajar internasional atau *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022 yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). PISA mendefinisikan kemampuan membaca sebagai "Kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksikan teks untuk mencapai tujuan tertentu, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi dalam masyarakat". Untuk mengukur kemampuan tersebut, PISA melakukan tes dan survei kepada sampel pelajar berusia 15 tahun dari puluhan negara. Pada 2022, pelajar Indonesia memperoleh skor kemampuan membaca 359 poin, jauh di bawah skor rata-rata negara anggota OECD yang kisarannya 472-480 poin. Skor Indonesia juga lebih rendah dibanding lima negara tetangga di ASEAN. Seperti terlihat pada grafik. Malaysia dan Thailand memperoleh skor lebih baik dari Indonesia. Sementara itu, negara tetangga lain skornya jauh lebih tinggi, yakni Brunei Darussalam, Vietnam, dan Singapura.



Gambar 1. Hasil Survei PISA 2022: Kemampuan Membaca (Literasi) Pelajar di ASEAN

Jika kita berbicara mengenai tingkat literasi di Indonesia, kondisinya begitu memprihatinkan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melaksanakan Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Pelajar Internasional yang terdiri atas tiga aspek—antara lain membaca (literasi), sains, dan matematika. Terdapat sekitar 14.000 siswa yang terlibat pada penilaian PISA dan sampel penilaiannya dipilih secara acak oleh OECD. Pada 2009 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-57 dari 65 negara dalam bidang literasi dengan skor 402. Tiga tahun berikutnya, tingkat literasi Indonesia tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Peringkat literasi Indonesia yang tadinya ke-57 dari 65 negara menurun menjadi 60 dari 65 negara dengan skor 396. Kemudian pada tahun 2015, negara partisipan PISA bertambah sebanyak tujuh negara. Namun, hal ini tidak menjadikan peringkat tingkat literasi Indonesia meningkat secara signifikan. Tatkala itu, skor literasi Indonesia sebesar 397. Hanya meningkat satu poin dari skor literasi sebelumnya. Pada 2018, angka literasi Indonesia menurut PISA menurun, dengan skor sebesar 371. Kemudian data terbaru skor PISA Indonesia dalam bidang literasi pada tahun 2022 menunjukkan penurunan kembali dengan skor sebesar 359. Salah satu faktor penurunan skor PISA Indonesia di bidang literasi adalah adanya Pandemi Covid-19.



Gambar 2. Skor PISA Indonesia Tahun 2006 s. d. 2022

Selaras dengan survei yang pernah dilaksanakan oleh PISA, pada tahun 2016, Central Connecticut State University dengan tajuk World's Most Literate Nations, Indonesia menempati

peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai tingkat literasi (Miller, 2016). Dari hasil survei yang telah diselenggarakan oleh kedua lembaga internasional di atas dapat kita simpulkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia dapat dibilang masih rendah—bahkan cenderung memprihatinkan. Indonesia sedang dalam situasi “darurat literasi”. Dampaknya jika Indonesia masih terus-menerus menyandang darurat literasi, Indonesia akan makin tertinggal dari negara-negara maju. Dampak lain yang tak kalah krusial jika tingkat literasi kita masih rendah ialah mudah diterimanya berita bohong (*hoax*) oleh masyarakat Indonesia. Orang yang minim kemampuannya akan literasi akan cenderung tidak bisa berpikir logis dan mudah terpancing berita bohong.

Untuk membangun budaya literasi masyarakat, terdapat beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah antara lain:

- 1) Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 48;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan pasal 1 ayat 4 dan pasal 36;
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 74;
- 4) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 5
- 5) Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti bagian VI;
- 6) Panduan Gerakan Literasi Nasional tahun 2017;

Dari beberapa regulasi yang mengatur mengenai literasi, pada intinya pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi literasi selaku aspek utama dalam pendidikan dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 36 poin a, “Pemerintah pusat bertanggung jawab menjamin terselenggaranya sistem perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi”. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 74 juga menjelaskan bahwa selain pemerintah menyediakan buku yang bermutu dan murah—pemerintah juga perlu melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca yang dilakukan melalui antara lain:

- a. Gerakan nasional gemar membaca;
- b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
- c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu
- e. taman bacaan masyarakat;
- f. rumah baca; dan/atau
- g. kegiatan sejenis lainnya.

Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 pun mengamanatkan sekolah berkewajiban menyelenggarakan kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Untuk mengupayakan pendidikan yang berkualitas melalui literasi sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah mencanangkan sebuah program bernama Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan Literasi Nasional merupakan sebuah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada abad ke-21 melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Gerakan Literasi Nasional mengembangkan enam jenis literasi yang dibutuhkan pada abad ke-21 antara lain literasi baca tulis, literasi sains, literasi numerasi, literasi kewargaan, literasi finansial, dan literasi digital. Sebagai sebuah gerakan, keenam jenis literasi ini dikembangkan melalui tiga ranah, yaitu keluarga (Gerakan Literasi Keluarga), sekolah (Gerakan Literasi Sekolah), dan masyarakat (Gerakan Literasi Masyarakat).

Gerakan Literasi Nasional secara umum bertujuan untuk menerapkan dan merealisasikan budaya literasi pada mulai dari lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat pada ekosistem pendidikan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas hidup. Prinsip-prinsip dari Gerakan



Literasi Nasional antara lain berkesinambungan, terintegrasi, dan melibatkan semua pemangku kebijakan. Salah satu praktik yang telah dilakukan pemerintah melalui program Gerakan Literasi Nasional adalah pendistribusian buku ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur) untuk jenjang PAUD dan SD yang dimulai pada tahun 2021. Imam Budi Utomo, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, menuturkan bahwa pemberian akses terhadap buku-buku yang berkualitas merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra dalam pengimplementasiannya bekerja sama dengan PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jawa Tengah untuk mencetak sebanyak 19.640 buku PAUD dan 2.978.450 buku Sekolah Dasar. Pemerintah juga senantiasa mengawasi dan mengevaluasi agar pendistribusian buku dapat tepat sasaran.

Kemudian apabila kita bandingkan bagaimana kondisi literasi di Malaysia—menurut hasil survei PISA tahun 2022 yang dilaksanakan oleh OECD menunjukkan bahwa Malaysia lebih unggul di bidang literasi. Indonesia memperoleh skor kemampuan membaca 359 poin, sedangkan Malaysia meraih skor kemampuan membaca 388 poin. Sementara itu, untuk tahun-tahun sebelumnya skor PISA Malaysia menunjukkan pola yang fluktuatif sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, Malaysia meraih skor PISA senilai 415 di bidang literasi. Kemudian pada tahun 2012, Malaysia meraih skor senilai 398 dan pada 2009 skor senilai 414. Walaupun demikian, skor PISA Malaysia di bidang literasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat PISA di bidang literasi pada tahun 2022, Malaysia menduduki peringkat ke-60 di dunia. Sementara itu, pada 2018, Malaysia menduduki peringkat ke-58 di dunia.

Walaupun skor literasi PISA Malaysia lebih unggul, Malaysia pun masih mengalami sejumlah problematika dalam hal literasi. Pada tahun 2008, terdapat 54.000 siswa SD yang tidak memiliki kemampuan literasi. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), jumlah rata-rata siswa yang tidak memiliki kemampuan literasi di tingkat sekolah dasar adalah 0,3 persen untuk laki-laki dan 0,2 persen untuk perempuan (Rahman, 2010). Mengingat masyarakat Malaysia yang multietnis—dengan bahasa resminya merupakan bahasa Melayu, bahasa keduanya merupakan bahasa Inggris, serta bahasa daerahnya merupakan Tamil dan Cina—pelajar di Malaysia rata-rata mempunyai kemampuan baca tulis dalam dua bahasa (Pandian, 1997). Badan Literasi Nasional Malaysia mengawasi literasi di Malaysia. Terdapat kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Pedesaan, Kementerian Sumber Daya Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Kewirausahaan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Lembaga-lembaga ini mendorong kegiatan membaca mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan. Kementerian-kementerian tersebut berkomitmen untuk membangun desa. Hal ini ditunjukkan dengan menyelenggarakan kelas literasi bagi petani. Para petani diajarkan materi yang berkaitan dengan pertanian dan tugas sehari-hari mereka.

Selain kelas literasi bagi petani, Pemerintah Malaysia juga memiliki program-program lain yang merupakan bentuk inisiatif dalam mengatasi buta aksara—antara lain:

- 1) Program Pendidikan Keluarga Harmonis;
- 2) Program Pendidikan Agama dan Program Pelatihan Keterampilan;
- 3) Pusat Sumber Daya Masyarakat dan Program Membaca;
- 4) Program Keaksaraan Fungsional;
- 5) Program Prasekolah;
- 6) Program Kerja Masyarakat dan Pusat Kegiatan Masyarakat.

Dilansir dari Malaysia *Education Blueprint*, untuk menghadapi tantangan yang makin masif di abad ke-21 dan memenuhi kebutuhan seluruh warga Malaysia dengan baik, Kementerian Pendidikan Malaysia memiliki visi dan aspirasi yang menjadi landasan bagi transformasi dari sistem pendidikan Malaysia. Terdapat lima *outcome* yang hendak dicapai Pemerintah Malaysia yang tertuang dalam *Blueprint* tersebut, antara lain:

- 1) *Access* (Akses);
- 2) *Quality* (Kualitas);
- 3) *Equity* (Keadilan);



- 4) *Unity* (Persatuan);
- 5) *Efficiency* (Efisiensi).

Tabel 1.
Perbandingan Tingkat Literasi Indonesia dan Malaysia dari Berbagai Sumber

Lembaga Survei	Tahun	Indeks/Poin/Peringkat	
		Indonesia	Malaysia
ASEAN Key Figures	2010-2020	96%	95%
PISA	2022	359 poin	388 poin
PISA	2018	371 poin	415 poin
PISA	2012	396 poin	398 poin
PISA	2009	402 poin	414 poin
Central Connecticut State University	2016	Peringkat ke-60 dari 61 negara	Peringkat ke-53 dari 61 negara

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Data menunjukkan tingkat literasi Malaysia yang lebih tinggi—walaupun selisih antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Menyandarkan dari penjelasan di atas terkait problematika literasi di Asia Tenggara, penulis mencoba mengontekstualisasikan dengan tema penelitian ini, yaitu perbandingan Kemendikbudristek di Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam upaya meningkatkan literasi. Lantas, penulis mencoba untuk menganalisis melalui sudut pandang kelembagaan keduanya dengan mencoba mengkaitkan antara teori dengan kejadian empirik. Tentunya, sudut pandang kelembagaan ini menggunakan studi perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam upaya meningkatkan literasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan literasi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perbedaan, persamaan, kelebihan, dan kekurangan kebijakan literasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia serta Kementerian Pendidikan Malaysia. Penelitian ini dirancang sebagai studi perbandingan (*comparative study*), yang bertujuan untuk menggambarkan perbedaan dan persamaan kebijakan serta pendekatan pemerintah kedua negara dalam bidang literasi. Studi perbandingan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek kelembagaan dan tingkat kebijakan literasi di kedua negara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui. Studi Pustaka Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, serta dokumen resmi dari kedua kementerian Pendidikan; Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci dari kedua negara yang memiliki pemahaman dan keterlibatan dalam kebijakan literasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive* dan *snowball*, yang berarti pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu dan informan pertama dapat merekomendasikan informan selanjutnya; dan Observasi langsung terhadap program literasi yang dilakukan di berbagai sekolah dan komunitas di Indonesia dan Malaysia juga dilakukan untuk melengkapi data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis komparatif, di mana kebijakan literasi di Indonesia dan Malaysia dibandingkan berdasarkan dimensi kelembagaan dan tingkat kebijakan literasi. Dimensi kelembagaan meliputi regulasi, program, serta infrastruktur

pendidikan yang mendukung literasi, sementara dimensi kebijakan literasi dilihat dari cakupan tingkat literasi, mulai dari tingkat performatif, fungsional, hingga epistemik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan antara kedua negara dalam meningkatkan literasi.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, triangulasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data dari berbagai sumber, baik melalui studi pustaka, wawancara, maupun observasi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan cross-check antara temuan dari berbagai informan dan literatur terkait untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dimensi Kelembagaan Pemerintah Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Literasi, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dalam meningkatkan literasi melalui pendekatan kelembagaan melibatkan analisis terhadap regulasi formal, struktur kelembagaan, serta program literasi yang diterapkan untuk mendukung peningkatan kemampuan literasi masyarakat.

Analisis tersebut mencakup tiga dimensi utama:

- 1) *Deskriptif-Induktif*: Analisis ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan antar kebijakan literasi di Indonesia dengan negara lain, khususnya Malaysia, melalui kajian historis dan deskriptif dari regulasi yang ada.
- 2) *Legal-Formal*: Melibatkan analisis terhadap regulasi terkait literasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang menjadi landasan hukum dalam upaya peningkatan literasi nasional.
- 3) *Historical Comparative*: Pendekatan ini membandingkan dinamika kebijakan literasi di Indonesia dari masa ke masa, mulai dari periode Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, dengan fokus pada perubahan pendekatan kebijakan dan implementasi program literasi.

Dalam aspek *legal-form* atau regulasi terdapat berbagai peraturan yang mendasari upaya literasi di Indonesia. Poin-poin utama dari bagian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang menegaskan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia;
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang menjamin ketersediaan buku bermutu, murah, dan tanpa diskriminasi di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung ekosistem perbukuan yang sehat;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 yang mendukung UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 74 dari peraturan ini menegaskan pentingnya menyediakan buku berkualitas, memperkuat perpustakaan, dan membudayakan kegemaran membaca di masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti Gerakan Nasional Gemar Membaca;
- 4) Permendikbud No. 23 Tahun 2015, yang mewajibkan sekolah untuk menyelenggarakan aktivitas membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Salah satu inisiatif utama adalah Gerakan Literasi Nasional (GLN), yang diluncurkan sebagai bagian dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan pendekatan yang holistik, mencakup literasi di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. GLN ditekankan sebagai strategi nasional untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan abad ke-21. Dalam kerangka Gerakan Literasi Nasional, pemerintah mengidentifikasi enam jenis literasi yang penting untuk abad ke-21, yaitu literasi baca tulis, literasi sains, literasi numerasi, literasi kewargaan, literasi finansial, dan literasi digital. Pengembangan



keenam jenis literasi ini dilakukan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai tiga pilar utama dalam mendorong masyarakat melek literasi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah adalah pendistribusian buku-buku ke daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Program ini bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan memiliki akses terbatas terhadap bahan bacaan berkualitas. Pada tahun 2021, buku-buku untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) didistribusikan ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski upaya ini telah melibatkan pihak swasta untuk mendukung pencetakan dan distribusi, implementasinya masih dihadapkan pada beberapa kendala logistik.

Selain itu, kerjasama lintas kementerian juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi. Kemendikbud menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperkuat literasi digital, serta dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam literasi keluarga. Kolaborasi ini menunjukkan pendekatan lintas sektor yang dirancang untuk memperluas dampak dan efektivitas program literasi di berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah juga menggiatkan Gerakan Literasi Masyarakat dengan melibatkan berbagai komunitas dan organisasi lokal. Melalui program bantuan pemerintah (Banpem), komunitas literasi di berbagai daerah diberdayakan untuk menyelenggarakan program literasi lokal. Selain itu, pemerintah juga mendukung kegiatan studi banding antar komunitas literasi untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan kemampuan literasi di wilayah masing-masing. Di kalangan generasi muda, pemerintah menginisiasi ajang Duta Bahasa Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi, terutama di kalangan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi mencakup program-program strategis yang berfokus pada pengembangan literasi di berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Meskipun ada tantangan, terutama dalam hal implementasi dan distribusi, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mendorong peningkatan literasi nasional demi masa depan yang lebih baik.

Aspek *historical comparative* menjelaskan bahwasannya pemerintah dalam meningkatkan literasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa, yang dibedakan menjadi tiga era utama: Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi.

Pada masa Orde Lama (1945-1966), tingkat buta huruf sangat tinggi, dengan sekitar 90% penduduk Indonesia masih buta huruf. Pemerintah memulai Program Pemberantasan Buta Huruf (PBH) pada tahun 1948, yang meskipun dilakukan di tengah situasi perang, berhasil menurunkan angka buta huruf menjadi 40% pada tahun 1960-an. Pada era ini, literasi masih difokuskan pada kemampuan dasar membaca dan menulis.

Memasuki masa Orde Baru (1966-1998), angka buta huruf memang menurun dibandingkan masa Orde Lama, tetapi masih cukup tinggi. Pemerintah melanjutkan upaya literasi dengan meluncurkan Program Paket ABC dan Program Aksarawan Fungsional, yang difokuskan untuk menghapuskan buta huruf. Namun, rezim Orde Baru lebih menekankan pada birokrasi pemerintahan dibandingkan mobilisasi besar-besaran dalam mengatasi buta huruf. Program Bulan Buku Nasional juga diadakan, tetapi lebih sebagai formalitas. Pada masa ini, rezim Soeharto juga dikenal dengan pelarangan terhadap buku-buku yang mengkritik pemerintah, sehingga perkembangan literasi menghadapi tantangan dari sisi kebebasan berekspresi.

Pada era Reformasi (1998-sekarang), pemerintah menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan literasi, baik dari segi kebijakan maupun penyediaan sarana membaca. Gerakan Literasi Nasional (GLN) diluncurkan pada tahun 2015, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLN bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan enam literasi dasar, yakni literasi baca tulis, sains, numerasi, kewargaan, finansial, dan digital. Selain itu, infrastruktur literasi dan akses buku mulai lebih mudah didapatkan, meskipun masih ada tantangan seperti



harga buku yang mahal dan kesulitan akses di daerah-daerah terpencil. Angka buta huruf terus menurun, dan pemerintah mulai memperluas pemahaman literasi yang meliputi kemampuan berpikir kritis dan memproses informasi.

Secara keseluruhan, setiap era memiliki tantangan dan pendekatan yang berbeda dalam meningkatkan literasi. Pemerintah telah berusaha mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program, meskipun masih terdapat kendala terutama dalam penyediaan akses literasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Masuk kedalam dimensi *legal-form* pada Negara Malaysia dalam peningkatan literasinya, pemerintah Malaysia telah menjalankan berbagai upaya kelembagaan dan regulatif dalam meningkatkan literasi di negara tersebut. Salah satu kerangka hukum yang mendasari kebijakan literasi Malaysia adalah Konstitusi Federal Malaysia Pasal 12, yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, keturunan, atau tempat lahir. Selain itu, Malaysia juga memiliki dokumen strategis penting, yaitu Malaysia Education Blueprint, yang menjadi pan duan dalam transformasi sistem pendidikan. Blueprint ini berfokus pada lima sasaran utama yang mencakup akses pendidikan, kualitas, keadilan, persatuan, dan efisiensi. Dalam upaya meningkatkan literasi, pemerintah Malaysia telah membentuk berbagai program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Salah satu program utama adalah LINUS (Literacy and Numeracy Screening), yang dirancang untuk membantu siswa di sekolah dasar mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Selain itu, Modul Literasi Awal (MULA), yang berfokus pada anak usia dini, juga merupakan salah satu program penting yang dikembangkan untuk memastikan bahwa anak-anak memulai pendidikan mereka dengan landasan yang kuat dalam literasi. Program ini juga dilengkapi dengan upaya untuk mendukung keragaman etnis, mencerminkan sifat multikultural masyarakat Malaysia.

Selain peran Kementerian Pendidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka juga memainkan peranan signifikan dalam upaya peningkatan literasi di Malaysia, terutama dalam mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Dewan ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan untuk memajukan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat, termasuk melalui program National Reading Decade, yang bertujuan membentuk budaya membaca yang lebih luas di Malaysia. Meski begitu, pemerintah Malaysia menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program-program ini, terutama di wilayah pedesaan seperti Sabah dan Sarawak, di mana akses terhadap bahan bacaan masih terbatas. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan beberapa inisiatif digital, seperti Digital Literacy Empowerment Program for Persons with Disabilities, program-program tersebut masih menghadapi kendala infrastruktur, khususnya di daerah terpencil.

Dengan demikian, meskipun pemerintah Malaysia telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui regulasi dan inisiatif kelembagaan untuk meningkatkan literasi, masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan akses yang merata di seluruh negeri.

Jika membahas lewat *historical comparative* terkait upaya literasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia melalui Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), sebuah lembaga penting yang memiliki peran utama dalam mengembangkan dan mempromosikan bahasa Melayu dan literasi di Malaysia. Salah satu program yang menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan literasi adalah LINUS (Literacy and Numeracy Screening), yang dirancang untuk mengidentifikasi dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca dan berhitung. Program ini ditujukan bagi siswa sekolah dasar dan bertujuan memastikan bahwa semua siswa memperoleh kemampuan literasi dan numerasi dasar sebelum melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, Malaysia juga memiliki inisiatif yang lebih luas melalui Dekad Membaca Kebangsaan. Program ini mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendorong kebiasaan membaca di kalangan masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan akses terhadap buku dan bahan bacaan yang berkualitas melalui perpustakaan dan fasilitas umum lainnya. Perpustakaan Nasional Malaysia menjadi salah satu institusi kunci dalam mendukung program ini, dengan upaya menyediakan berbagai macam buku dan bahan bacaan

untuk masyarakat luas. Dalam kerangka regulasi, pemerintah Malaysia mengembangkan sejumlah kebijakan untuk mendukung gerakan literasi nasional. Blueprint Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah salah satu dokumen strategis yang memberikan arahan bagi pengembangan pendidikan dan literasi di Malaysia. Blueprint ini menekankan pentingnya akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi di semua lapisan masyarakat.

Kendala yang dihadapi Malaysia dalam meningkatkan literasi termasuk akses terbatas ke buku di daerah pedesaan dan perbedaan tingkat literasi antar etnis. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam literasi melalui berbagai program dan kebijakan.

Secara *historical comparative* negara Malaysia sama-sama melalui beberapa fase yakni Fase Pertama (1957-1970); Fase Kedua (1970-1990an); Fase Ketiga (1990an-Sekarang).

Setelah kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia mulai mengembangkan kebijakan literasi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pada saat itu, tingkat literasi mencapai 50%, yang kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun 1995. Pemerintah fokus pada pengembangan sekolah vernakular, yaitu sekolah berbasis etnis Melayu, Cina, dan Tamil. Salah satu pencapaian utama adalah peningkatan jumlah sekolah vernakular dari 788 pada tahun 1938 menjadi 2.172 sekolah pada tahun 1956. Sistem pendidikan ini mempertahankan perbedaan etnis dan bahasa, yang menjadi tantangan dalam upaya menciptakan kesetaraan literasi.

Pada fase kedua, kebijakan literasi sangat dipengaruhi oleh *New Economic Policy* (NEP), yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan memperbaiki disparitas etnis. Salah satu langkah penting adalah pengenalan kelas literasi dewasa di pedesaan dan kebijakan perubahan bahasa pengantar di sekolah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Melayu. Selain itu, modernisasi sektor pertanian dan peningkatan akses ke pendidikan dasar menjadi prioritas, terutama di wilayah pedesaan yang sebelumnya kurang terjangkau oleh program literasi.

Fase ketiga berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge economy*) dan pencapaian Visi 2020. Pemerintah Malaysia mulai memperkenalkan program-program literasi yang lebih inklusif, seperti LINUS (*Literacy and Numeracy Screening*), yang dirancang untuk memastikan siswa menguasai literasi dasar dan numerasi pada tiga tahun pertama pendidikan dasar. Selain itu, terdapat berbagai inisiatif digital dan literasi finansial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Upaya peningkatan literasi di Malaysia menunjukkan perkembangan signifikan, terutama melalui program yang lebih holistik dan berorientasi masyarakat. Dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia lebih berhasil dalam menurunkan angka buta aksara dan meningkatkan literasi melalui berbagai pendekatan yang sistematis, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses literasi di daerah pedesaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia memiliki upaya yang signifikan dalam meningkatkan literasi melalui program-program berbasis pendidikan dan kelembagaan. Perbedaan mendasar antara kedua negara terlihat pada aspek kebijakan literasi yang diterapkan. Malaysia telah lebih maju dalam mencapai tingkat literasi epistemik, didukung oleh program LINUS dan MULA yang berfokus pada pendidikan dasar dan literasi awal. Sementara itu, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, seperti Gerakan Literasi Nasional, namun implementasi di lapangan masih belum optimal, terutama dalam aspek literasi epistemik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Malaysia telah berhasil menerapkan strategi yang lebih holistik dan inklusif, terutama melalui pendidikan multietnis dan pendekatan yang mendalam terhadap literasi fungsional. Sebaliknya, Indonesia, meskipun memiliki kebijakan literasi yang lebih luas, menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil. Oleh karena itu, terdapat ruang untuk perbaikan dalam kebijakan dan strategi literasi di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas literasi di semua tingkatan.



Indonesia sebaiknya fokus pada penguatan implementasi kebijakan literasi, khususnya Gerakan Literasi Nasional, dengan mengatasi tantangan distribusi buku dan akses di daerah terpencil. Pemerintah bisa memperluas cakupan program literasi digital untuk menjangkau lebih banyak siswa dan komunitas yang memiliki keterbatasan akses fisik terhadap bahan bacaan. Kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kominfo, serta sektor swasta perlu diperluas untuk mendukung peningkatan literasi. Program seperti penyediaan perpustakaan digital dan pelatihan literasi digital harus diperkuat untuk menghadapi tantangan literasi abad ke-21. Meskipun kebijakan literasi Indonesia telah mencakup berbagai tingkatan, perhatian lebih harus diberikan pada literasi epistemik, yang menjadi fondasi bagi kemampuan berpikir kritis dan penalaran mendalam. Program literasi berbasis keluarga dan masyarakat dapat diperkuat untuk mendukung perkembangan literasi epistemik di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Indonesia dapat mempelajari pendekatan Malaysia, seperti program LINUS dan MULA, untuk meningkatkan literasi dasar di kalangan siswa sekolah dasar. Malaysia telah berhasil memfokuskan upaya pada literasi sejak dini dan pada kelompok-kelompok terpinggirkan, yang bisa menjadi model bagi kebijakan literasi di Indonesia. Diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program literasi yang telah berjalan di kedua negara. Selain itu, penelitian lebih lanjut sebaiknya mengkaji dampak kebijakan literasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk pada aspek numerasi dan kemampuan berpikir kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A. (2018, December 13). Msia pushes reading nation aspiration under National Reading Decade programme. *Straits Times*. <https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2018/12/440330/msia-pushes-reading-nation-aspiration-under-national>
- Affandi, M. (1982). *Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan*. Alumni.
- Ahdiat, A. (2023, December 8). PISA 2022: Kemampuan Membaca Pelajar Indonesia Tergolong Rendah di ASEAN. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/08/pisa-2022-kemampuan-membaca-pelajar-indonesia-tergolong-rendah-di-asean>
- Ahmad, F. R. (2017). Reformasi Birokrasi Negeri Bagian Kelantan dalam Pandangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Ditinjau dari Fiqi Siyasah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Angelia, D. (2022, October 10). Tingkat Literasi Penduduk Negara Asia Tenggara. *Goodstats*. <https://goodstats.id/article/tingkat-literasi-negara-asia-tenggara-gSjhj>
- Anggraeni, P. R. (2019). Implementasi Kebijakan Literasi Sekolah guna Peningkatan Karakter Gemar Membaca. *IJSEED*.
- Antara. (2019, December 4). Peringkat pendidikan Indonesia di bawah Malaysia dan Brunei China yang terbaik di dunia. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50648395>
- Apter, D. E. (1977). *Introduction to political analysis*. Winthrop.
- Aulia, S. A. (2020). Kepentingan Malaysia Dalam Mewujudkan Melaka dan George Town Sebagai World Heritage City Oleh UNESCO. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis terhadap Auxilary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*.



- Blondel, J. (2013). *Comparative Government an Introduction*. Routledge.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cheong, K.-C., Hill, C., & Leong, Y.-C. (2016). *Malaysia's Education Policies and The Law of Unintended Consequences*. *Journal of International and Comparative Education*.
- Dede. (2020). *Perbandingan Hak Pendidikan dalam Konstitusi Negara Indonesia dengan Konstitusi Beberapa Negara di Asia Tenggara*. *Jurnal Nalar Pendidikan*.
- DSE/CEOV. (1994). *Keys to Life Professional Development Program for Secondary Subject Teachers*. Department of School Education/Catholic Education of Victoria.
- Edzan, N. (2008). *Information Literacy Development in Malaysia: A Review*. Libri.
- Gani, E., & Christiani, W. (2014). *Pendekatan Kelembagaan dalam Ilmu Politik*. FISIP Universitas Indonesia.
- Ginting, E. S. (2020). *Penguatan Literasi di Era Digital*. Prosiding Seminar Nasional PBSI-III.
- Gopal, D., Nafey, A., Yadav, R., Vijapur, A., Sahadevan, P., Joshi, A., ... & Reddy, S. (2021). *Introduction to Comparative Government and Politics*. Indira Gandhi National Open University.
- Hague, R., & Harrop, M. (2004). *Comparative Government and Politics An Introduction (6th ed.)*. PALGRAVE MACMILLAN.
- Humaedi, A. (2023). *Tinjauan Yuridis tentang Perbedaan Kekuasaan Yang Di Pertuan Agong dan Perdana Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Malaysia*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Indonesia, P. P. (2016). *Sistem Pemerintahan Negara*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- J. J. R. (2018). *The Social Contract*. Arcturus Holdings Limited.
- Kansil, C. S., & Kansil, C. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Lokadata. (2018). *Rata-rata PISA di ASEAN 2018*. Lokadata. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/rata-rata-pisa-di-asean-1575520414>
- Maltengkab, P. (2023, April 14). *Jejak literasi Indonesia Sejarah Singkat*. Perpusda Maltengkab. <https://perpusda.maltengkab.go.id/jejak-literasi-indonesia--sejarah-singkat>
- Maesaroh, W. S. (2017). *Perbandingan Strategi Pemerintah dalam Pengendalian Urbanisasi (Studi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Istimewa Seoul)*. Universitas Padjadjaran.
- Mahmuzar. (2013). *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Nusamedia.



- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdaya.
- Mulyadi, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Rajawali Pers.
- Mulyawan, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. UNPAD PRESS.
- Nadiroh, S. U. (2022). *Analisis Implementasi Gerakan Literasi Nasional di Sekolah Dasar Plus Rahmat Kota Kediri*. Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Naufal, M. (2021). *Comparative Government: Perbandingan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Singapura*. Universitas Padjadjaran.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Nurfatriani, F., Yulianto, E., & Kurniawan, Y. (2019). *Literacy in Rural and Urban Indonesia*. *Journal of Literacy and Media Education*.
- Oktaviana, R. (2014). *Perbandingan Hukum Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Fungsi Dewan Rakyat Malaysia*. Universitas Internasional Batam.
- Pamudji. (1985). *Perbandingan Pemerintahan*. Bina Aksara.
- Primus, J. (2022, October 14). *Sejarah Pemberantasan Buta Huruf demi Rakyat Sejahtera*. Kompas. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/14/180000079/sejarah-pemberantasan-buta-huruf-demi-rakyat-sejahtera>
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan*. Mutiara Sumber Daya Widya.
- Sari, E. (2015). *Ilmu Negara*. Biena Edukasi.
- Star, T. (2023, November 6). *Digital literacy to empower the disabled*. The Star. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2023/11/06/digital-literacy-to-empower-the-disabled>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suwana, F. (2017). *Empowering Indonesian women through building digital media literacy*. *Kasetsart Journal of Social Sciences*.
- Triebel, A. (2005). *Literacy in Developed and Developing Countries*. In N. Bascia, A. Cumming, A. Datnow, K. Leithwood, & D. Livingstone (Eds.), *International Handbook of Educational Policy*. Springer.
- Walter, P. (1999). *Defining Literacy and Its Consequences in the Developing World*. *International Journal of Lifelong Education*.
- Winarno, B. (2009). *Kebijakan ekonomi pada pemerintahan Mahathir Mohammad Upaya meningkatkan perekonomian etnis Melayu*. Universitas Gadjah Mada.
- Winengan. (2017). *Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*.